BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Berakhirnya Perang Dingin yang ditandai oleh keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1990-an telah memunculkan corak baru dalam perkembangan Hubungan Internasinal. Hal tersebut telah mempengaruhi isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya terfokus pada *high politic issues* yang meliputi isu politik dan keamanan menjadi *low politic* issue yang meliputi isu hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup dan terorisme. *Low politic issues* tersebut dianggap telah sama pentingnya dengan *high politic issues* (Kegley & Witkopf, 1997:4).

Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Mc. Clelland dalam Perwita dan Yani, mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai berikut :

> "Hubungan Internasional sebagai suatu studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadan relevan yang mengelilingi interaksi"(Perwita & Yani, 2005: 4)

Johari dalam "*International Relations and Politics (Theoritical Perspective)",* mengkonsepsikan mengenai kajian hubungan internasional yaitu:

> "Kajian dalam hubungan internasional sangat luas, meliputi seluruh jenis hubungan atau interaksi antar negara termasuk asosiasi dan organisasi non negara serta jalinan hubungan yang bersifat politik maupun non politik" (Johari, 1985:9).

Luasnya cakupan Hubungan Internasional menyebabkan Hubungan Internasional sebagai studi yang berdiri sendiri membutuhkan pendekatan yang bersifat interdisipliner. Menurut Columbis dan Wolfe, studi Hubungan Internasional adalah:

> "Hubungan internasional meliputi kajian ilmu politik, ekonomi, hukum, sosiologi, antropologi serta ilmu sosial lainnya termasuk ilmu pengetahuan lainnya seperti fisika, kimia, dan *cybernetic* (Columbis & Wolfe, 1999:21).

Hubungan Internasional dilakukan oleh aktor-aktor internasional seperti individu, *nation state,* maupun organisasi internasional yang sifatnya lintas batas. Menurut Rosenau terdapat lima aktor Hubungan Internasional, yaitu:

1. Individu-individu tertentu
2. Kelompok-kelompok dan organisasi swasta
3. Seluruh negara bangsa beserta pemerintahannya
4. Organisasi Internasional
5. Seluruh wilayah geografis dan pengelompokan-pengelompokan politik utama dunia, seperti dunia ketiga (Rosenau, 1976:5)

Jadi menurut T. May Rudy dalam "*Administrasi dan Organisasi Internasional",* Hubungan Internasional dapat disimpulkan sebagai berikut:

> "Hubungan Internasional adalah hubungan yang mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain (Rudy, 1993:3).

Dalam mengkaji Ilmu Hubungan Internasional dapat menggunakan berbagai pendekatan. Masih menurut T. May Rudy, dalam buku yang sama, Hubungan Internasional merupakan:

> "Ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya, ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya. Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang Hubungan Internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan lainya. Demikian juga untuk menelaah Hubungan Internasional dapat meminjam dan menyerap konsep-konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian Hubungan Internasional (Rudy, 1993:3).

Secara lebih spesifik, Mas'oed menyampaikan substansi Hubungan Internasional bisa dipilah ke dalam dua belas kelompok pertanyaan fundamental, yaitu:

1. *Bangsa dan Dunia*. Bagaimana dan dalam bentuk apa hubungan antara suatu bangsa dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya dilakukan?
2. *Proses transnasional dan Interdependensi Internasional*. Sejauh mana pemerintah dan rakyat dari suatu negara-bangsa bisa menentukan masa depannya sendiri? Berapa besar kemungkinannya untuk besikap independen dari bangsa lain?
3. *Perang dan Damai*. Apa yang menentukan terjadinya perang dan perdamaian diantara bangsa-bangsa?
4. *Kekuatan dan Kelemahan*. Bagaimana sifat kekuatan (*power*) dan kelemahan suatu pemerintah atau suatu bangsa dalam politik internasional?
5. *Politik Internasional dan Masyarakat Internasional*. Apa yang bersifat politik dalam Hubungan Internasional dan apa yang tidak? Bagaimana hubungan antara Politik Internasional dengan kehidupan masyarakat bangsa-bangsa?
6. *Kependudukan versus Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Apakah jumlah penduduk dunia tumbuh lebih cepat daripada penyediaan bahan makanan, energi dan sumber daya alam lainnya, dan lebih cepat daripada daya dukung lingkungan, dalam arti udara dan air yang bersih serta lingkungan alam tanpa polusi?
7. *Kemakmuran dan Kemiskinan*. Berapa besar ketimpangan distribusi kekayaan dan penghasilan diantara bangsa-bangsa di dunia?
8. *Kebebasan dan Penindasan*. Seberapa jauh kepedulian bangsa-bangsa tentang kebebasan mereka dari bangsa atau negara lain dan berapa jauh mereka mempedulikan kebebasan di dalam bangsa atau negara mereka sendiri?
9. *Persepsi dan Ilusi*. Bagaimana para pemimpin dan warga suatu negara memandang bangsa mereka sendiri dan bangsa lain serta perilaku mereka?

Berapa kadar kenyataan atau khayalan dalam persepsi ini? Kapan persepsi itu bersifat realistik atau ilusi?

10. *Aktivitas dan Apati*. Lapisan dan kelompok mana dalam masyarakat yang berminat aktif terhadap politik?
11. *Revolusi dan Stabilitas*. Dalam kondisi apa kemungkinan suatu pemerintah dapat digulingkan?
12. *Identitas dan Transformasi*. Bagaimana individu, kelompok dan bangsa mempertahankan identitas mereka? Unsur-unsur apa yang membentuk identitas itu? (Mas'oed, 1990:29-32).

Dalam Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara, tetapi juga dengan subjek lain seperti interdepedensi ekonomi, hak asasi manusia, perusahaan transnasional, organisasi internasional, lingkungan hidup, ketimpangan gender, keterbelakangan, dan lain-lain. Kaum pluralis sendiri memandang hubungan internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja tetapi juga merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

2.2 Paradigma Pluralis

Paradigma bisa diartikan sebagai aliran pemikiran yang memiliki kesamaan asumsi dasar tentang suatu bidang studi, termasuk kesepakatan tentang kerangka konseptual, petunjuk metodelogis dan teknik analisis. Selain itu, paradigma juga berfungsi untuk menentukan batas-batas ruang lingkup suatu disiplin atau kegiatan keilmuan dan menetapkan ukuran untuk menilai keberhasilan disiplin tersebut (Mas'oed, 1990:8).

Pluralis merupakan salah satu perspektif yang berkembang pesat. Kaum pluralis memandang Hubungan Internasional tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu sebagai aktor utama dan aktor tunggal.

Empat asumsi Paradigma Pluralis, yaitu:

1. Aktor-aktor non-negara adalah entitas penting dalam Hubungan Internasional yang tidak dapat diabaikan, contohnya Organisasi Internasional baik yang pemerintahan maupun non-pemerintahan, aktor transnasional, kelompok-kelompok bahkan individu.

2. Negara bukanlah aktor Unitarian, melainkan ada aktor-aktor lainnya yaitu individu-individu, kelompok kepentingan dan para birokrat. Dalam hal ini dalam pengambilan keputusan atau kebijakan suatu negara, tidak semata-mata absolut berdasarkan kepentingan negara tersebut, namun juga dalam pembuatan kebijakan atau keputusan dapat juga dipengaruhi oleh individu-indivu, kelompok kepentingan dan para birokrat. Hal tersebut terjadi karena suatu kebijakan yang diambil oleh suatu negara mewakili masyarakatnya.

3. Menentang asumsi realis yang menyatakan negara sebagai aktor rasional, dimana pluralis menganggap pengambilan keputusan oleh suatu negara tidak selalu didasarkan pada pertimbangan yang rasional, akan tetapi demi kepentingan-kepentingan tertentu.

4. Agenda dalam Politik Internasional adalah luas, pluralis menolak bahwa ide Politik Internasional sering didominasi dengan masalah militer. Agenda Politik Luar Negeri saat ini sudah berkembang dan militer bukanlah satu-satunya hal yang paling utama, tetapi ada hal-hal utama lain didalam Hubungan Internasional seperti ekonomi dan sosial. Contoh perhatian dari pluralis adalah dalam bidang perdagangan, keuangan, dan isu energi sehingga bagaimana hal-hal tersebut dapat menjadi perhatian utama dalam agenda politik internasional. Hal lain yang mempengaruhi dunia internasional menurut kaum pluralis adalah bagaimana mengatasi permasalahan populasi dunia di bagian negara-negara dunia ketiga. Masalah populasi tersebut dapat mempengaruhi keberadaan sumber daya alam yang berkaitan dengan isu ketahanan nasional suatu negara. (Viotti dan Kauppi, 1990:215).

Kenyataan bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor dalam Hubungan Internasional akan menimbulkan adanya interaksi dan saling ketergantungan. Saling ketergantungan tersebut lambat laun akan melahirkan Kerjasama Internasional yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.

2.3 Kerjasama Internasional

Konsep mengenai kerjasama disampaikan oleh Cooley, dimana kerjasama tersebut terjadi dan timbul apabila:

> "Orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna" (Cooley, 1930:176).

Sedangkan kerjasama menurut Douherty dan Graff, dapat diartikan sebagai:

> "Perangkat hubungan yang tidak didasarkan pada unsur paksaan dan kekerasan. Kerjasama dapat muncul akibat adanya komitmen individu dan negara untuk mendapatkan kesejahteraan kolektif"(Douherty & Graff, 1997:418).

Namun demikian kesejahteraan kolektif tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan kerjasama kolektif antara individu dan negara saja namun diperlukan kerjasama yang lebih luas seperti kerjasama internasional.

Kerjasama internasional menurut Coplin dan Marbun:

> "Kerjasama yang awalnya terbentuk dari satu alasan dimana negara ingin melakukan interaksi rutin yang baru dan lebih baik bagi tujuan bersama. Interaksi-interaksi ini sebagai aktifitas pemecahan masalah secara kolektif, yang berlangsung baik secara bilateral maupun secara multilateral (Coplin & Marbun, 2003:282).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri.

Isu utama dari kerjasama internasional menurut Douherty dan Graff, yaitu:

> "Berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentinagn tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan. Berbagai masalah tersebut telah membawa negara-negara di dunia untuk membentuk suatu kerjasama internasional" (Douherty & Graff, 1997:419).

Menurut Koesnadi Kartasasmita dalam "Organisasi dan Administrasi Internasional", menjelaskan pengertian kerjasama internasional yang dapat dipahami sebagai:

> "kerjasama dalam masyarakat internasional suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdepedensia dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena *national understanding* serta mempunyai arah tujuan sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara Negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik (Kartasasmita, 1997: 20)"

Tujuan dari Kerjasama Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan Negara-negara tertentu. Tujuan dari kerjasama internasional dikonsepsikan secara jelas oleh Plano dan Olton, yaitu:

> "Untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai. Kerjasama itu kemudian diformulasikan ke dalam sebuah wadah yang dinamakan organisasi internasional. . Organisasi internasional merupakan sebuah alat yang memudahkan setiap anggotanya untuk menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya" (Plano dan Olton, 1979:271).

2.4 Organisasi Internasional

2.4.1 Definisi dan Klasifikasi

Benih-benih organisasi internasional, termasuk gagasan pemikirannya, sudah mulai tumbuh sejak zaman yunani kuno ketika mulai berkembangnya sistem negara kota di Yunani kuno. Walaupun demikian, Organisasi-organisasi internasional yang ruang lingkupnya mendunia (global) dan bidang kegiatannya luas, dirintis sejak masa berlangsungnya *The Hague Conference I* dan *II* yaitu pada tahun 1899 dan 1907. Kemudian dari konferensi tersebut berlanjut dengan tumbuhnya organisasi internasional global seperti Liga Bangsa-bangsa di tahun 1920 dan Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1945 (Coulombis & Wolfe, 1986:256).

Organisasi Internasional dalam "*The International Relations Dictionary"* didefinisikan sebagai berikut:

> "*A formal arrangement transcending national boundaries that provides for establishment of institutional machinery to facilitate cooperation among*

> *members in security, economic, social or related fields* (suatu pengaturan formal yang melintasi batas-batas nasional yang menciptakan suatu kondisi bagi pembentukan perangkat institusional guna mendukung kerjasama diantara anggota-anggotanya dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial dan bidang-bidang lainnya)" (Plano dan Olton, 1979:319).

Pengaturan formal disini menunjukkan arti pentingnya aturan-aturan yang disepakati sebagai landasan kerjasama atau sebagai pedoman kerja bagi pihak-pihak yang tergabung didalam organisasi tersebut. Melintasi batas-batas nasional menggambarkan cakupan, jangkauan, wilayah kerja dan asal-usul kewarganegaraan atau kebangsaan dari pihak-pihak yang tergabung dalam organisasi yang membedakannya dari organisasi – organisasi yang berskala nasional (hanya 1 negara). Disini tidak dibedakan antara negara, pemerintah, kelompok atau individu.

Masih menurut Plano dan Olton, organisasi internasional merupakan sebuah alat yang memudahkan setiap anggotanya untuk menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya (Plano dan Olton, 1979:271).

Kemudian Clive Archer dalam bukunya "*International Organization",* mendefinisikan organisasi internasional sebagai:

> "Sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dari para anggotannya" (Archer, 1983: 35).

Sedangkan Pengertian organisasi internasional menurut Michael Hass dalam Perwita dan Yani, memiliki dua pengertian yaitu:

> "Pertama, organisasi internasional sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi

satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi internasional ini" (Hass, 2005:93).

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non pemerintah.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 1990:3).

Beberapa syarat (kriteria) utama dalam membentuk suatu organisasi internasional, yaitu:

1. Tujuan dan maksud yang hendak dicapai merefleksikan adanya kesamaan kepentingan dari masing-masing anggota.
2. Pencapaian tujuan tersebut mencerminkan adanya partisipasi keterlibatan dari setiap negara anggota.
3. Adanya suatu kerangka institusional yang bersifat permanen, yang ditandai dengan adanya staf sekretariat yang tetap.
4. Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral internasional, yang didasarkan pada perjanjian internasional yang mengikat masing-masing anggotanya.
5. Organisasi internasional wajib memiliki karakteristik yang sesuai dengan Hukum Internasional (Feld, Jordan & Hurwitz, 1992:10).

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional bila dilihat dari keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan

keanggotaan (*extend of membership*). Bila menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara sebagai anggota atau *International Govermental Organizations* (IGOs), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *International Non-Govermental Organizations* (INGOs).

Menurut Theodore A. Coulombis & James H. Wolfe dalam *"Introduction to International Relations: Power and Justice"*, IGOs dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, yaitu:

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum:
   Organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, sosial-ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah PBB.
2. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas:
   Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan untuk satu fungsi spesifik. Contohnya *International Labour Organization* (ILO), *World Health Organization* (WHO), *United Nations on AIDS* (UNAIDS), dan lain sebagainya.
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum:
   Organisasi seperti ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan sosial-ekonominya berskala luas. Contohnya adalah Uni Eropa, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), Uni Afrika, dan lain sebagainya.
4. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya terbatas:
   Organisasi ini dibagi atas organisasi sosial-ekonomi, contohnya adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (LAFTA), serta organisasi militer/pertahanan, contohnya adalah *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Pakta Warsawa (Columbis & Wlofe, 1986: 281).

Klasifikasi organisasi internasional menurut tujuan dan aktivitasnya berkisar dari yang bersifat umum hingga yang khusus dan terbagi menurut orientasinya, yaitu,

menuju pada hubungan kerjasama para anggotanya, menurunkan tingkat konflik atau menghasilkan konfrontasi antar anggota atau yang bukan anggota.

Selain aktivitas organisasi internasional menurut diatas, aktivitas organisasi internasional menurut Clive Archer dapat juga diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Organisasi internasional yang melakukan aktivitas politik tingkat tinggi (*High Politics*). Dalam aktivitas politik tingkat tinggi termasuk didalamnya bidang diplomatik dan militer yang dihubungkan dengan keamanan dan kedaulatan.
2. Organisasi internasional yang memiliki aktivitas politik tingkat rendah (*Low Politics*). Dalam aktivitas politik tingkat rendah adalah aktivitas dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya (Archer, 1984:36).

Klasifikasi yang terakhir adalah berdasarkan struktur organisasi internasional. Setiap organisasi internasional harus mempunyai struktur formal tersendiri yang ditetapkan di dalam sebuah perjanjian. Bentuk struktur formal dari masing-masing organisasi internasional berbeda antara satu dengan yang lainnya (Archer, 1984:36).

Struktur dimaknakan sebagai aspek formal dalam suatu organisasi yang merupakan perbedaan secara vertikal dan horizontal ke dalam tingkatan-tingkatan departemen dan kemudian secara formal merumuskan aturan, prosedur dan peranan. Setiap organisasi juga mempunyai fungsi yang ditetapkan untuk mencapai tujuannya. Fungsi dapat dimaknakan sebagai struktur yang menjalankan kegiatannya (Mas'oed, 1993:24).

Dengan memperhatikan strukturnya, maka dapat dilihat bagaimana suatu institusi membedakan antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga, dengan

demikian, dapat dilihat bagaimana suatu organisasi internasional dalam memperlakukan anggotanya. Selain itu, struktur juga dapat melihat tingkat kemandirian institusi dari anggotanya yang berupa pemerintahan dan melihat keseimbangan antara elemen pemerintahan dan yang bukan pemerintahan.

2.4.2 Fungsi Organisasi Internasional

Menurut Bennet dalam buku Internasional *Organization, Principle, and Issue,* fungsi organisasi internasional adalah:

1. Menyediakan sarana kerjasama antar negara, yang mana kerjasama tersebut menyediakan manfaat bagi semua anggotanya.
2. Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah, agar area akomodasi dapat dieksplorasi dengan mudah terutama ketika muncul suatu permasalahan (Bennet, 1995:3)

Sedangkan menurut Clieve Archer fungsi organisasi internasional secara umum dapat dibagi kedalam sembilan fungsi, yaitu:

1. Artikulasi dan Agregasi
   Organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.
2. Norma
   Organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrumen yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau fungsi-fungsi non-diskriminasi.
3. Rekrutmen
   Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.
4. Sosialisasi

Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan diantaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau diantara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama.

5. Pembuat Peraturan
   Sistem internasional tidak mempunyai pemerintahan dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian *ad-hoc*, atau oleh organisasi internasional.
6. Pelaksanaan Peraturan
   Pelaksanaan keputusan organisasi internasional hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Di dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan oleh organisasi internasional seringkali lebih terbatas pada pengawasan pelaksanaannya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara anggota.
7. Pengesahan Peraturan
   Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional. Fungsi ajudikasi dilaksanakan oleh lembaga kehakiman, namun fungsi ini tidak dilengkapi dengan lembaga yang memadai dan tidak dibekali oleh sifat yang memaksa sehingga hanya terlihat jelas bila ada pihak-pihak negara yang bertikai.
8. Informasi
   Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.
9. Operasional
   Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal, yang sama halnya seperti dalam pemerintahan. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh UNHCR yang membantu pengungsi, *World Bank* yang menyediakan dana, UNICEF yang melakukan perlindungan terhadap anak-anak, dan lain sebagainya (Archer, 1983: 69-78).

2.4.3 Peranan Organisasi Internasional

Peranan merupakan aspek dinamis. Apabila seseorang atau suatu kelompok melaksanakan hak dan kewajibannnya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari konsep peranan tersebut muncullah istilah peran. Peran menurut Perwita dan Yani adalah "Seperangkat tingkat yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Berbeda dengan peranan yang sifatnya mengkristal, peran bersifat insidental" (Perwita dan Yani, 2005:29).

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan.

Peranan (*role*) dapat di artikan sebagai "Perilaku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai status" (Horton & L. Hunt, 1987:132). Peranan juga dapat dilihat sebagai:

> "Tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu posisi. Peranan memiliki sifat saling tergantung dan berhubungan dengan harapan. Harapan-harapan ini tidak terbatas hanya pada aksi (*action*), tetapi juga termasuk harapan mengenai motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*), perasaan (*feelings*), sikap (*attitudes*) dan nilai-nilai (*values*)" (Perwita & Yani, 2005:30).

Selain konsep diatas, peranan juga dikonsepsikan oleh K.J Holsti dalam "Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis" yaitu:

> "Konsep peranan bisa dianggap definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan dan

> fungsi negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok, kekhawatiran serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan variabel sistematik geografi dan ekonomi" (Holsti, 1992:159).

Namun dalam hal ini, Clive archer mendefinisikan peranan dalam konteks organisasi internasional yang dilihat dari bagaimana peranan organisasi internasional tersebut di dunia internasional, yang terdiri dari 3 poin penting, yaitu:

1. Instrumen (alat), organisasi internasional digunakan sebagi alat bagi anggotanya untuk mencapai kepentingannya
2. Arena (forum), organisasi internasional dalam hal ini menyediakan tempat untuk rapat, berkumpul, berdebat, kerjasama atau aling berbeda pendapat bagi anggotanya
3. Aktor, organisasi internasional adalah aktor yang independent dimana ia mampu bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan luar dan mampu mempengaruhi arah-arah kejadian di dunia, selain itu dilihat dari adanya fakta bahwa manusia mengidentifikasi diri dan kepentingannya melalui organisasi bukan lagi melalui negara bangsa (Archer, 1983:130-136).

2.5 Ketahanan Pangan

Masalah ketahanan pangan berkaitan dengan keamanan nasional suatu negara dimana pangan merupakan salah satu sumber daya yang diperlukan bagi kelangsungan hidup negara tersebut. Terdapat tiga elemen pokok keamanan nasional yang menjadi objek acuan dalam sebuah negara, yaitu:

1. *Idea of State*, ialah gagasan yang mengikat seluruh warga negara menjadi suatu entitas politik yang independen.
2. *The Institutional expression of the State,* yang merupakan lembaga pemerintahan dan penegakan hukum.
3. *Physical Base of State,* ialah sumberdaya untuk menunjang kelangsungan hidup dari negara tersebut (Buzan, 1991:65).

Masalah ketahanan pangan juga telah menjadi perhatian dunia bahkan menjadi isu keamanan non tradisional dalam hubungan internasional. Isu keamanan non-tradisional tersebut mulai mengemuka pada akhir dekade 1990-an yang dimana mencoba memasukan aspek-aspek diluar hirauan tradisional kajian keamanan, seperti masalah kerawanan pangan, kemiskinan, kesehatan, lingkungan hidup, perdagangan manusia, terorisme dan bencana alam. Berangkat dari hal tersebut maka konsep keamanan pun tidak lagi berbicara mengenai keamanan negara namun juga mengenai keamanan manusia (Hermawan, 2007:13).

Masalah keamanan manusia pun masuk dalam laporan tahunan UNDP, *Human Development Report 1994* yang mencoba mengetengahkan tujuh dimensi untuk menciptakan ketahanan manusia yang mencakup kemanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan individu, keamanan komunitas dan keamanan politik (Hermawan, 2007:13).

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (Http://www. Ginandjar . com /public /unpas 26nov.pdf [diakses 8 Desember 2008]).

Pengertian ketahanan pangan pun disampaikan oleh Arifin Wahidin dalam "Ayo Wujudkan Kedaulatan atas Pangan", yaitu "Ketahanan pangan ada ketika semua

orang pada setiap saat mempunyai akses terhadap makanan empat sehat lima sempurna baik fisik maupun ekonomik" (Wahidin, 2005:4).

Sedangkan ketahanan pangan menurut FAO adalah "Akses bagi semua penduduk atas makanan yang cukup untuk hidup sehat dan aktif" (Http://www.ginandjar. com/public/unpas26nov.pdf [diakses 8 Desember 2008]).

Senada dengan yang dikemukakan oleh FAO mengenai pengertian pangan, D.H penny dalam "Kemiskinan: Peranan Sistem Pasar" mendefinisikan ketahanan pangan merupakan "Jaminan akses nagi setiap orang pada setiap waktu untuk memperoleh pangan yang cukup bagi kehidupan yang aktif dan sehat" (1997:17).

Terdapat tiga konsep mengenai ketahanan pangan menurut FAO, yaitu:

1. *Food availability,* ialah ketersediaan makanan secara fisik yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan pilihan makanan pada manusia.
2. *Food entitlement,* yang merupakan kemampuan seseorang untuk mendapatkan makanan yang cukup untuk dikonsumsinya.
3. *Food utilization,* adalah penggunaan secara tepat dari makanan yang didapatkan oleh setiap orang. Hal ini berkaitan dengan gizi yang terkandung di dalam makanan (Simatupang & Stoltz, 2001:15).

Dari tiga konsep yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu disampaikan juga definisi ketidaktahanan pangan atau *infood security*. Ketidaktahanan pangan adalah:

> "Suatu kondisi ketika orang terancam atau menderita karena kekurangan makanan yang disebabkan oleh tidak tersedianya makanan, tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan makanan dan atau penggunaan makanan yang tidak tepat" (Simatupang & Stoltz, 2001:17).

Terdapat dua macam tipe ketidaktahanan pangan menurut FAO, yaitu:

1. *Chronic Food Security*, yaitu terjadinya ketidaktahanan pangan secara terus menerus yang berlangsung sangat lama. Ketidaktahanan pangan ini ditunjukan dengan adanya kelaparan dan malnutrisi. Penyebab dari ketidaktahanan pangan ini adalah karena produktifitas yang rendah dalamsektor pertanian, curah hujan yang rendah, kurangnya air untuk produksi pertanian dan peternakan, kurangnya tenaga kerja dalam sektor pertanian sehingga menyebabkan rendahnya dan ketidakpastian pendapatan penduduk desa dan kota dan akhirnya timbul kemiskinan yang erat kaitannya dengan ketidaktahanan pangan.
2. *Transitory Food Security,* yaitu peristiwa ketidaktahanan pangan yang berlangsung sementara. Hal tersebut dapat menyebabkan wabah penyakit dan kelaparan. Penyebab dari ketidaktahanan pangan ini disebabkan oleh krisis ekonomi, bencana alam dan perang (Http://www.fao.org /spfs/objectives_en.stm#top [diakses 10 Desember 2008]).

2.6 Pangan

Dari pengertian ketahanan pangan dan ketidaktahanan pangan yang telah disampaikan sebelumnya, maka pangan dapat didefinisikan sebagai berikut:

> "Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, serta pembuatan makanan atau minuman" (Http://www. Ginandjar . com /public /unpas 26nov.pdf [diakses 8 Desember 2008]).

Pangan merupakan kebutuhan hidup yang esensial. Sesuai dengan nalurinya manusia akan dapat melakukan apa saja untuk memperoleh pangan yang cukup bagi eksistensi hidupnya. Seperti yang dikemukakan oleh Harianto dalam "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ketahanan Pangan", pangan adalah:

> "Makanan yang cukup, aman, dan bergizi yang diperlukan untuk menjaga eksistensi dan kesejahteraan hidup suatu warga negara, lebih jauh lagi kecukupan pangan sangat penting untuk daya saing dan efesiensi perekonomian nasional" (Harianto, 1997:41).

Namun menurut Ir. Thomas Darmawan dalam "Pertanian Mandiri" beranggapan bahwa:

> "Pangan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling penting dan yang pertama kali harus dicukupi oleh setiap manusia. Namun hal tersebut sama sekali bukan bereti bahwa manusia diciptakan dan hidup hanya untuk makan, melainkan manusia secara bijaksana harus makan agar tetap bisa bertahan hidup dan melakukan aktifitasnya secara optimal" (Darmawan, 2002:137).

Pengertian pangan sendiri menurut Suhardjo dalam "Pangan, Gizi dan Pertanian", pangan merupakan "Bahan yang dimakan guna memenuhi keperluan tubuh untuk tumbuh, bekerja dan perbaikan jaringan" (Suhardjo, 1985:252).

.Pengertian pangan juga dikonsepsikan oleh I.Wibowo dalam "Belajar dari Cina", yaitu "Pangan di Cina adalah kebutuhan dasar yang mengarah pada pembangunan sumber daya pangan baik buah-buahan, sayuran, daging, dan lain-lain" (Wibowo, 1994:20).